

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Pemkot Batal Tanggung Uang Muka
Entitas / Cakupan	: Kota Bogor
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal. 4
Edisi	: Jumat, 22 Juni 2018

Pemkot Batal Tanggung Uang Muka

BOGOR, (PR).-

Pemerintah Kota Bogor batal menanggung uang muka kios untuk relokasi pedagang kaki lima Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Bogor Tengah. Hal ini membuat para pedagang semakin menolak rencana relokasi.

Di sisi lain, pemerintah tetap akan membongkar lapak mereka setelah Pemilihan Wali Kota Bogor 2018. Pemkot Bogor awalnya akan menanggung uang muka tersebut melalui dana hibah. "Setelah dikaji, PKL tidak termasuk sebagai sasaran penerima dana hibah. Kita harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada," kata Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor Hanafi, Kamis (21/6/2018).

Meskipun demikian, sesuai target, pelaksanaan relokasi tetap akan dilakukan hingga pertengahan Juli 2018 mendatang. Keputusan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama seluruh dinas terkait dalam rapat koordinasi di Balai Kota Bogor, Kamis siang.

Awalnya, Pemkot Bogor akan merelokasi para PKL setelah Lebaran. Namun, berdasarkan usulan dari kepolisian, relokasi ditunda hingga pelaksanaan pilwalkot pada 27 Juni 2018 mendatang. Salah satunya untuk mengantisipasi gangguan keamanan jelang hari pemungutan suara. "Pelaksanaan relokasi diundur untuk menghindari kondisi yang tidak diinginkan. Sampai pelaksanaannya nanti, kami terus lakukan negosiasi dengan para PKL," kata Hanafi.

Meski mendapatkan penolakan dari para pedagang, Hanafi memastikan relokasi tersebut harus tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13/2005.

Secara terpisah, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menegaskan relokasi PKL di Jalan Dewi Sartika tidak

bisa dibatalkan. Ia beralasan, relokasi tersebut untuk menunjang kelancaran lalu lintas setelah penerapan sistem satu arah di jalan sekitar Istana Kepresidenan dan Kebun Raya Bogor.

"Pemerintah sudah berupaya memberikan keringanan kepada para pedagang, mulai dari mengurangi uang muka kios dari 20 menjadi 10 persen, menghilangkan uang kebersihan dan sebagainya untuk sementara setelah relokasi," kata Ade.

Relokasi, menurut Ade, juga untuk meningkatkan status sosial dan kesejah-

teraan mereka dari PKL menjadi pedagang di pasar.

Sementara itu, Ketua Kelompok PKL Taman Topi Umar Sanusi menegaskan, belum ada pedagang yang mendaftarkan diri untuk relokasi tersebut. "Intinya pedagang menolak karena banyak keluhan dan masukan kami soal relokasi itu tidak direspons," ujarnya.

Pedagang, lanjut Umar, mengaku keberatan membayar uang muka sebesar Rp 5 juta serta cicilan kios sebesar Rp 1,5 juta per bulan. **(Hilmi Abdul Halim**